

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suatu kondisi politik akan ikut serta mempengaruhi kondisi negara tersebut karena dari kondisi politik inilah menjadi salah satu faktor representatif kondisi negara hari itu dan kedepannya juga, termasuk di Indonesia dimana pada setiap tahunnya kondisi politik akan terus berubah terlebih pada saat menjelang tahun politik. Kondisi politik di Indonesia sendiri bisa dinyatakan tidak stabil dan bergerak secara dinamis setelah harus melalui masa perjuangan yang sangat berdarah-darah yaitu pada era reformasi tahun 1998, pada pemerintahan orde lama sendiri Indonesia merasakan demokrasi yang sangat semu dimana di era kepemimpinan soeharto proses demokratisasi menghilangkan dan Indonesia lebih mengarah kepada sistem yang condong otoriter.

Namun dengan kegigihan dan kepekaan masyarakat mengenai demokrasi sehingga munculnya perlawanan untuk Indonesia segera melaksanakan sistem demokrasi yang baik dan benar. Sehingga peristiwa tahun 1998 menjadi titik balik kondisi politik Indonesia yang menuju lebih baik dengan ditandai bangkitnya nilai-nilai demokrasi yang selama pemerintahan orde baru telah hilang dan tidak dirasakan baik oleh masyarakat dan negara.

Kondisi politik pasca reformasi semakin tahun mulai memainkan ritme politiknya, karena dengan berlandaskan sistem demokrasi yang membuat Indonesia

semakin menemukan jati dirinya untuk bisa mengatur dan mempola keadaan negara ditambah konstelasi politik yang mulai berkembang membuat roh demokrasi semakin terasa, Proses demokratisasi semakin terasa karena Indonesia membuat pembagian hak dan kekuasaan sendiri supaya negara bisa berjalan segala mestinya, adanya pilar yang sangat penting yaitu trias politika membuat Indonesia bisa menyeimbangkan dan mengatur kondisi negara karena dengan trias politika.

Trias Politica menurut Montesquieu menyebutkan bahwa kekuasaan harus dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan yang masing-masing dijalankan oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan yudikatif (Fathur, 2018) hal itu mempunyai konsep yang jelas dimana lembaga diatur sesuai dengan tugas dan poksinya, dalam trias politika juga antar lembaga akan berkesinambungan dikarenakan antar lembaga dalam sistem tersebut akan terus melengkapi satu sama lain, pembatasan kekuasaan itu menjadi stimulus perubahan bagi bangsa Indonesia sehingga bisa berkembang dan sistem tersebut diberlakukan sampai dengan era sekarang.

Kondisi konstestasi politik di Indonesia yang dinamis dan mulai kompetitif membuat corak yang sangat menarik karena Indonesia sendiri mempunyai sub-sub yang sangat banyak sehingga keadaan politik tidak bisa ditebak dan terus berubah. Hal itu juga menjadi sebuah rangsangan untuk perkembangan kondisi politik lokal yang ada di daerah karena di setiap daerah pasti memiliki sebuah corak politik tersendiri, hal itu membawa angin segar bagi proses demokratisasi yang ada di Indonesia. Dengan hal itu aulah demokrasi ketika menggelar pesta demokrasi akan sangat terasa karena dari konstelasi politik ini akan mempengaruhi bagaimana

kondisi sebuah kontestasi politik akan berjalan, semakin baik kontestasi politik berjalan maka niscaya semakin baik juga hasil yang dikeluarkan dalam pesta politik itu terlebih pada saat Pemilu baik untuk Legislatif atau Eksekutif.

Kontestasi dalam politik ini juga sebagai jalan stimulus dalam hal perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh aktor-aktor politik berjalan secara dinamis, salah satu bentuk untuk bisa mendapatkan kekuasaan yang lebih dengan cara legal demokratis seperti yang tertuang pada Undang-Undang di Republik Indonesia pada nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”.

Dengan adanya pemilu merupakan salah satu cara mendapatkan ruang demokrasi dan dibuatnya demokrasi perwakilan atau legislatif diharapkan masyarakat bisa berkontribusi secara langsung demi kebaikan bangsa dan negara , konsep demokrasi tertuang jelas di dalam Undang-Undang No 7 pada Tahun 2017 mengenai pemilu dimana semua orang berhak mendapatkan hak politiknya tanpa terkecuali , asas jujur dan adil juga menyelimuti Pemilu di Indonesia sebagai bukti dan konsistensi bahwa Indonesia merupakan negara Demokrasi, memberikan setiap ruang hak demokrasi nya kepada masyarakat lewat pemilu serta pemilu dijadikan

alat untuk nantinya bisa memegang tongkat kendali dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara.

Pemilihan Umum tersendiri merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi negara demokrasi, sebagai suatu sistem demokrasi lebih nyata dan teruji serta paling diakui karena dianggap realistis dan rasional untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial, politik, ekonomi yang populis, adil dan beradab. Walau demikian demokrasi sendiri bukan tanpa adanya kekurangan Tesis-tesis mengenai demokrasi dengan pemilunya membuat sebagian pengguna otoriter dan tiran menyebut bahwa sistem yang digunakan sebagai sebuah sistem yang demokratis. Selain Trias Politika salah satu elemen lainnya yang tidak kalah penting terhadap demokrasi yaitu Pemilihan Umum, terlebih pada pasca era reformasi Indonesia menggenjot proses demokratisasi yang selama ini tergerus pada era orde baru.

Rakyat sendiri sebagai pemilik kedaulatan mempunyai suatu hak istimewa dalam kehidupan politik demokrasi, rakyat sendirilah sebagai aktor untuk memainkan demokrasi itu sendiri, namun dalam demokrasi tetap memiliki sistem keterwakilan salah satunya yang disebut Legislatif karenanya anggota di Legislatif harus bisa menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat yang bisa mengakomodir kepentingan serta aspirasi masyarakat banyak. Budiardjo (2008) menjelaskan fungsi lembaga Legislatif ada dua yaitu:

- a. Menentukan sebuah kebijakan dan membuat suatu undang undang Untuk melaksanakan fungsi yang demikian maka anggota Legislatif diberi hak inisiatif hak untuk bisa mengadakan amandemen terhadap rancangan undang undang yang disusun pemerintah dan hak budgeting.
- b. Menjadikan fungsi kontrol yakni menjaga dan mengawasi agar semua tindakan lembaga eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan fungsi kontrol ini maka lembaga Legislatif memiliki hak untuk bertanya, hak interpelasi, hak angket dan mosi.

Dengan hal itu posisi dewan Legislatif menjadi kursi panas yang diperebutkan oleh masyarakat, sehingga rakyat akan terus berjuang demi mendapatkan kekuasaan lewat dewan Legislatif, hal lainya bahwasanya Demokratisasi juga akan dipengaruhi oleh partai politik, Ranney dan Kendal menjelaskan dalam (Firmanzah,2011) mendefinisikan sebuah partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk bisa mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan memberikan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik.

Sejatinya partai politik hanya dijadikan alat kendaraan masyarakat untuk bisa mencapai kekuasaannya, maka jika partai politik adalah kendaraan tapi tujuan salah satunya yaitu kursi panas dewan Legislatif. Partai politik akan bertarung untuk bisa merebut kekuasaan hal itu terjadi ketika kontestasi politik berjalan terutama pada Pemilihan Umum, semenjak Pemilu Legislatif dari tahun 1999 PDI-Perjuangan memenangkan kontestasi politik Indonesia terutama di Legislatif sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 1999, 2014 dan 2019 (Sumber:

dataindonesia.id) partai akan mengerahkan segala cara dan kemampuannya untuk bisa memenangkan kontestasi, hal itu terjadi di banyak daerah Indonesia salah satunya Kabupaten Cirebon dimana kontestasi politik pada pemilihan Legislatif selalu didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pergulatan politik sangat dinamis terjadi salah satunya di Kabupaten Cirebon dimana semenjak reformasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat menguasai kondisi politik yang ada di Kabupaten Cirebon, tercatat semenjak tahun 2004 – 2018 Ketua Legislatif selalu diisi oleh kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dikarenakan perolehan kursi Legislatif selalu unggul, selama kurang lebih 15 tahun lamanya sampai dengan sampai kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terutama pada Legislatif selalu kuat sampai pada akhir tahunnya Pemilu tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus mengakui kegagalan yang dibuat oleh Partai Kebangkitan Bangsa (Sumber: Pikiran-Rakyat.Com).

Dominasi tersebut tidak berubah walaupun ketika jabatan kepala daerah atau eksekutif dikuasai oleh partai lain namun di kursi Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap menjadi pemegang kursi terbanyak, hal ini menandakan bahwa akar rumput partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sudah sangat dalam di Kabupaten Cirebon, masyarakat Cirebon sudah menemukan kecocokan sendiri ketika memang kursi-kursi Legislatif diduduki oleh orang yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebuah struktur sosial yang sudah terjadi tidak disadari oleh masyarakat Cirebon, Satrio Arismunandar (2009) menjelaskan pemikiran Bourdieu mengenai doxa yaitu sebuah kepercayaan atau nilai-nilai yang

tidak sadar, mendalam dan mendasar. Doxa sendiri mendukung pengaturan sosial tertentu pada ranah dengan demikian mengistimewakan kelompok yang dominan tersebut sebagai bukti, artinya dominasi yang sudah dibuat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini merupakan sebuah pembatinaan yang disengaja oleh orang.

Sebuah fenomena politik tersendiri yang sudah terjadi di Kabupaten Cirebon Prov.Jawa Barat, bahwasanya selama jangka waktu 15 tahun kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Cirebon selalu diisi oleh kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetapi tidak hanya kursi ketua saja namun jumlah perolehan kursi Legislatif yang diperoleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selalu mendapatkan kursi terbanyak, tahun demi tahun kejayaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kursi Legislatif terus berjaya sampai pada akhirnya merambat ke kursi eksekutif dimana tahun 2014 orang nomor satu di Kabupaten Cirebon diisi oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun kekuasaan yang dibangun oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu runtuh ketika menghadapi kontestasi politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai aktor utama yang bisa menggeser kekuasaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Legislatif Kabupaten Cirebon.

Dalam data tercatat perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa meraih 10 kursi hal tersebut sebuah peningkatan dikarenakan pada tahun 2014 Partai Kebangkitan Bangsa hanya mampu memperoleh 8 kursi Legislatif, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya bisa meraih 8 kursi di pemilihan Legislatif 2019 yang pada tahun 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu memperoleh 11 kursi sekaligus menghantarkan kadernya sebagai ketua

DPRD Kabupaten Cirebon (Sumber: KPU Kabupaten Cirebon). Basis akar rumput Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai dipertanyakan kekuatannya karena kekalahan pada pemilu Legislatif tahun 2019, kader-kader militan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya bisa diam ketika strategi yang digunakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa sangat ampuh dan mujarab sehingga bisa menggeser kursi Ketua Dewan Legislatif yang selama ini dipegang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Data tersebut memperlihatkan bagaimana akhir dari sebuah kontestasi Pemilu Legislatif yang terjadi tahun 2019, dominasi kursi dari tiap-tiap partai memperlihatkan dominasi kekuasaan politik yang ada di Kabupaten Cirebon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersingkir dominasinya oleh Partai Kebangkitan Bangsa.

**Tabel 1.1 Jumlah Perolehan Kursi Legislatif di DPRD Kabupaten Cirebon  
Tahun 2014-2019**

<b>Partai Politik</b>	<b>Jumlah Kursi Legislatif Tahun 2014-2019</b>	<b>Jumlah Kursi Legislatif Tahun 2019-2024</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	8 Kursi Legislatif	10 Kursi Legislatif
Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan	11 Kursi Legislatif	8 Kursi Legislatif

Partai Golongan Karya	6 Kursi Legislatif	7 Kursi Legislatif
Partai Gerindra	6 Kursi Legislatif	7 Kursi Legislatif
Partai Nasional Demokrat	4 Kursi Legislatif	7 Kursi Legislatif
Partai Keadilan Sejahtera	5 Kursi Legislatif	6 Kursi Legislatif
Partai Demokrat	5 Kursi Legislatif	4 Kursi Legislatif
Partai Hanura	3 Kursi Legislatif	1 Kursi Legislatif
Partai Persatuan Pembangunan	1 Kursi Legislatif	0 Kursi Legislatif
Partai Bulan Bintang	1 Kursi Legislatif	0 Kursi Legislatif

(Sumber: kab.cirebon.kpu.go.id, 2019)

Hal ini juga mempengaruhi peta politik yang ada di Jawa Barat karena selama ini Kabupaten Cirebon dikenal dengan kandang banteng terkuat, dengan adanya kasus tersebut sebuah hal yang menarik bahwa kompetisi politik yang ada di Kabupaten Cirebon ini mulai berubah karena kontestasi Pemilu Legislatif tahun 2019, strategi-strategi yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama ini masih relevan atau tidak ketika melihat fakta bahwa Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pemenang pemilu Legislatif.

Terdapat salah satu daerah yang ada di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cirebon yang dirasa mempunyai corak warna tersendiri dalam kondisi politiknya, karena Kabupaten Cirebon mempunyai banyak sub-sub yang bisa merubah kondisi dan peta politik diantaranya beberapa faktor seperti kondisi sosial budaya masyarakat,

pendidikan dan agama yang bisa mempengaruhi konstelasi politik yang ada di Kabupaten Cirebon. Kondisi Sosial Budaya di Cirebon karena masyarakat yang cenderung masih mempertahankan budaya Cirebon yang sangat kental, ditambah banyaknya basis pesantren yang ada di Cirebon serta pendidikan yang baik membuat peta politik akan sangat berpengaruh oleh hal-hal tersebut. Karena pesantren sendiri bisa dijadikan sebuah kekuatan politik pada saat kontestasi terjadi, namun dalam sisi lain masyarakat mempunyai budaya politik yang sangat kental ketika kontestasi politik itu sedang berlangsung.

Termasuk pada proses-proses demokratisasi di Indonesia harus diiringi dengan cara-cara yang baik terlebih ketika pada proses pemilihan umum untuk menentukan sekelompok orang yang mengisi dalam jajaran pemerintah, salah satu proses yang bisa dilihat sehat tidaknya adalah ketika melakukan perpolitikan. Adanya Marketing Politik sebagai jalan stimulus untuk bisa bertarung dalam kontestasi, marketing sendiri akrab dengan cara-cara orang supaya bisa mempengaruhi dan mendoktrin orang lain supaya tergiur dan akhirnya membeli atau memilih orang tersebut, marketing sendiri dekat dengan perekonomian yang lebih mengarah pada sistem liberal dan kapitalis namun dalam hal ini perubahan struktur sosial juga bisa dimanfaatkan dan dikaitkan dalam politik.

Salah satu penggunaan marketing politik ini biasanya dilakukan dalam konstelasi dan kontestasi politik seperti salah satu di daerah Cirebon, konstelasi politik lokal Cirebon ini menyandingkan dua partai dengan basis yang berbeda yaitu basis mendukung islamis dan nasionalis, dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama 15 tahun akhirnya bisa dipatahkan oleh Partai Kebangkitan

Bangsa membuat situasi politik lokal sangat panas terlebih akan menghadapi tahun politik yang sebentar lagi terjadi pada 2024 mendatang, apakah Partai Kebangkitan Bangsa berhasil mempertahankan kekuasaannya atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan segera merebut tongkat kekuasaan kembali di Kabupaten Cirebon. Elite-elit Politik yang ada di Kabupaten Cirebon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga beberapa yang terjerat kasus korupsi hal lain yang merubah kondisi peta politik yang ada di Kabupaten Cirebon ini.

Dengan hal-hal tersebut jelinya setiap kader untuk bisa menggunakan marketing politik dengan baik sebagai tombak utama untuk bisa meraih kemenangan, karena adanya alih dominasi partai ini tentu dengan sebab cara partai Partai Kebangkitan Bangsa untuk bisa mengambil suara yang selama ini didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, marketing politik seperti apa yang digunakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa sehingga bisa merobohkan dominasi politik yang terjadi.

Marketing Politik sendiri sangat lumrah dilakukan pada saat kontestasi politik, tentu dalam penerapan marketing politik itu lewat pertimbangan dan juga analisa sesuai kondisi perubahan masyarakat di Kabupaten Cirebon, karena jika dilihat dari sejarah Implementasi mengenai sebuah konsep marketing politik oleh Bill Clinton dalam persaingan menjadi Presiden Amerika dapat dikategorikan sebagai tonggak penting sejarah marketing politik (Nursal, 2004). Implementasi marketing politik juga bisa dijadikan indeks proses demokratisasi apakah marketing politik yang digunakan itu secara sehat atau kotor.

Terlebih mengalahkan sebuah dominasi partai politik yang sudah berpuluh-puluh tahun mendominasi bukan sebuah hal yang mudah, ditambah slogan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyebut dirinya sebagai partai wong cilik dan juga sebagai kandang banteng Jawa Barat pasti memiliki kesulitan tersendiri untuk bisa mengalahkan dominasi suaranya. Namun Kesulitan tersebut ternyata bisa dipatahkan oleh kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa pada moment pemilihan Legislatif tahun 2019. Sebuah hal yang bisa dikatakan mustahil namun bisa terjadi, tentu hal itu dipengaruhi oleh strategi kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa untuk menghadapi Pemilu 2019. Marketing strategi politik yang digunakan itu bisa jadi sebagai tombak dan bekal untuk pemilu 2024 nanti.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Erika Prima Hernanda (2020), menyatakan dalam penelitiannya menekan kepada teori-teori yang ada pada marketing politik dengan dianalisa seperti penggunaan kampanye yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan menggolongkan bahwa cara-cara tersebut termasuk cara marketing politik seperti Pull Marketing, Push Marketing dan sebagainya.

Sedangkan Pesak, Jenifer, Daysi Posumah, dan Trilke Tulung (2021) penelitian yang dilakukan di Manado meninjau bagaimana Partai Solidaritas Indonesia yang dinilai baru tapi bisa memberikan warna lebih, para peneliti menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Peter Schroder, dimana pendekatan tersebut lalu ditinjau dengan strategi yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Kota Manado.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Mohammad Afrien (2018) lebih

condong untuk meneliti kemenangan suara dari Partai Amanat Nasional yang mengalami kenaikan, Afrien lebih terfokus kepada bagaimana strategi yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional di Kota Tarakan sehingga partai tersebut bisa mengalami kenaikan suara.

Dengan beberapa pernyataan dan juga penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul ini. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui strategi Partai Kebangkitan Bangsa Kab.Cirebon dalam memenangkan Pemilu Legislatif dimana hal tersebut merupakan sebuah torehan sejarah sendiri pasalnya partai politik yang selalu mendominasi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Strategi apa yang sudah digunakan oleh kedua partai sehingga menghasilkan sebuah sejarah baru, atau banyak faktor juga yang mempengaruhi dalam pembuatan strategi politik tersebut dan cara-cara yang digunakan kedua partai tergolong sehat atau tidak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Cara Partai Kebangkitan Bangsa Memenangkan Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Cirebon?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni untuk mengetahui bagaimana kondisi politik di Kabupaten Cirebon yang berpengaruh terhadap cara-cara partai politik dalam berkontestasi untuk mencapai kemenangan partai di bagian Legislatif Kabupaten Cirebon.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Harapan Penulis, dengan diselesaikannya penelitian ini semoga bisa memberikan banyak kontribusi dan manfaat bagi banyak pihak, antara lainnya sebagai berikut:

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini sangat diharapkan mampu mengasih sebuah kontribusi keilmuan di bidang politik terlebih dalam bagian peran marketing politik pada kontestasi politik yang digunakan oleh partai politik yang ada di Indonesia.

### **1.4.2 Secara Praktis**

- 1) Menambah sebuah pengetahuan, gagasan dan wawasan untuk penulis.
- 2) Memberikan manfaat bagi pembaca perihal marketing politik.
- 3) Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pada perubahan pola kontestasi politik yang terjadi di Kabupaten Cirebon terutama pada pemilihan Legislatif supaya bisa menggunakan strategi politik demi mendorong proses demokratisasi yang baik.

## **1.5 Batasan Masalah**

Dengan adanya batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk bisa membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini serta memudahkan pembaca supaya bisa lebih di pahami. Pembatasan masalah juga diperuntukan supaya tidak adanya kerancuan dan pembahasan yang berlebih mengenai hal lain supaya hasil penelitian bisa lebih maksimal terhadap perumusan masalah yang sudah dibuat.

Dalam penelitian ini dalam sebuah ruang lingkup penelitian Kontestasi Politik Lokal Kabupaten Cirebon (Studi Tentang Kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa di Pemilihan Legislatif 2019). Titik fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kontestasi politik lokal yang ada di Kab.Cirebon terutama pada kursi legislatif dimana selama ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi pemenang yang akhirnya dikalahkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 2019, pola-pola strategi yang digunakan masing-masing partai menjadi tinjauan utama dalam penelitian.